



LAPORAN TATA KELOLA 2021

BAB I

PENJELASAN UMUM

Perkembangan di dunia perbankan yang semakin pesat dan modern dengan dukungan teknologi informasi, membawa pengaruh terhadap strategi yang harus diterapkan oleh bank dalam menawarkan dan memasarkan produknya. Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi bisnis, strategi yang diterapkan tentu berkisar pada kegiatan memasarkan produk perbankan, dimana meliputi kegiatan menghimpun serta menyalurkan dana kepada masyarakat.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga intermediasi keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dan untuk masyarakat, maka penerapan tata kelola yang baik sudah menjadi suatu keharusan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan peraturan nomor 4/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat pada tahun 2015, yang mewajibkan BPR menerapkan prinsip- prinsip transparency, accountability, responsibility, independency dan fairness.

Tata Kelola yang ideal harus didukung dengan berbagai unsur- unsur penting yang meliputi peran aktif seluruh manajemen bank, penerapan fungsi kepatuhan yang efektif, pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko yang optimal. Tata kelola perusahaan yang baik dirasakan semakin sangat penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan berbagai tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan.

Manajemen PT BPR PURISEGER SENTOSA berkomitmen untuk melaksanakan prinsip- prinsip tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola.

Penyampaian transparansi penerapan Tata Kelola BPR yang merupakan salah satu cakupan dari laporan penerapan Tata Kelola BPR dilakukan dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan (transparency) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 POJK Tata Kelola BPR. Laporan penerapan tata kelola di PT BPR PURISEGER SENTOSA tahun 2020 disusun mengacu pada Surat Edaran OJK nomor 24/ SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1.	Nama	: Edy Suyono
	Jabatan	: Direktur Utama yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawaban atas pelaksanaan kepengurusan BPR , 2. menjalankan fungsi kepatuhan, mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sesuai dengan Anggaran Dasar 3. dan peraturan perundang undangan, menerapkan tata kelola, 4. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit 5. intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas lainnya. 6. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai antara lain dengan adanya : <ol style="list-style-type: none"> a. pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan b. penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain 7. Mempertanggungjawabkan tugasnya dalam RUPS, 8. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai. 9. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. 	
2.	Nama	: H Sucipto,SH
	Jabatan	: Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	Membantu Direktur Utama dalam pengelolaan dan pengawasan BPR, Memastikan dan meningkatkan tata tertib dan disiplin kerja serta membudayakan kepatuhan dan sadar Risiko	
	Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :	
	<p>Dalam upaya menindak lanjuti Rekomendasi dari Dewan komisaris Direksi telah melakukan upaya tindak lanjut dibidang perkreditan yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. telah mengeluarkan kebijakan pemberian keringanan bunga dan pembebasan denda terhadap debitur bermasalah yang melakukan pelunasan, peningkatan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit dengan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Account Officer dalam melakukan analisa kredit serta meningkatkan pemasaran dengan memanfaatkan media sosial yang dipunyai. namun belum dapat maksimal dalam pelaksanaannya terutama upaya penurunan NPL. 2. Dibidang SDM upaya peningkatan kedisiplinan terus dilakukan juga telah mengikutsertakan dalam berbagai pelatihan guna peningkatan pengetahuan SDM. 3. Dalam bidang manajemen kami telah melakukan upaya upaya agar ketahanan likuiditas tetap terjaga dan rasio rasio bisa tetap terjaga ditengah pandemi covid-19 namun hasilnya belum maksimal dibidang perkreditan dengan masih tingginya angka NPL 	

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
1.	Nama	: Dwi Harry Prasetyo,SE,MM
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. 3. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab 4. terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, 5. Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. 6. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: 7. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau 8. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR. 	
2.	Nama	: Drs Mochammad Jakin
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	<p>Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR , melaksanakan pengawasan atas tugas dan tanggung jawab Direksi, memberikan rekomendasi kepada Direksi, memastikan bahwa direksi telah menindak lanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari Dewan Komisaris</p>	
Rekomendasi Kepada Direksi :		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi dari Dewan Komisaris berkaitan dengan perkreditan yaitu perbaikan kualitas kredit dengan menurunkan NPL dengan cara melakukan penagihan lebih intensif, memberikan keringanan bunga dan penghapusan denda bagi debitur yang berniat melakukan pelunasan juga menerapkan prinsip kehati - hatian dalam penyeluran kredit serta meningkatkan ekspansi kredit dengan memperluas akses pemasaran dengan memanfaatkan media sosial., 2. Di Bidang SDM untuk lebih meningkatkan kedisiplinan serta peningkatan pengetahuan dan kemampuan SDM dengan mengikutkan pada berbagai pelatihan serta menjaga kesehatan SDM di masa pandemi covid-19 dengan melakukan himbauan vasinasi untuk seluruh karyawan, 3. Dibidang manajemen direksi hendaknya berusaha meningkatkan penerapan tata keloladan manajemen risiko serta menjaga ketahanan likuiditas serta menjaga rasio - rasio tetap terjaga 	

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1.						
2.						
3.						
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite				:	Nihil	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	Tidak ada
	Realisasi	:	Tidak ada
	Jumlah Rapat	:	0
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	Tidak ada
	Realisasi	:	Tidak ada
	Jumlah Rapat	:	0
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	Tidak ada
	Realisasi	:	Tidak ada
	Jumlah Rapat	:	0
Penjelasan Lebih Lanjut			
Belum memiliki Komite			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Edy Suyono	Rp. 0,00	0%
2.	H Sucipto,SH	Rp. 0,00	0%

Penjelasan Lebih Lanjut :

Semua Direksi PT BPR Puriseger Sentosa tidak mempunyai kepemilikan saham di PT BPR Puriseger Sentosa

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Edy Suyono			
2.	H Sucipto,SH			

Penjelasan Lebih Lanjut :

Semua anggota Direksi PT BPR Puriseger Sentosa tidak mempunyai saham di perusahaan lain.

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Edy Suyono	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	H Sucipto,SH	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut :

Seluruh anggota Direksi PT BPR Puriseger Sentosa tidak mempunyai hubungan keuangan dengan sesama direksi , Komisaris maupun dengan pemegang saham PT BPR Puriseger Sentosa

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Edy Suyono	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	H Sucipto,SH	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut :

Anggota Direksi PT BPR Puriseger Sentosa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan sesama direksi, Dewan komisaris maupun dengan pemegang saham PT BPR Puriseger Sentosa

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Dwi Harry Prasetyo,SE,MM	Rp. 220.000.000,00	11%
2.	Drs Mochammad Jakin	Rp. 0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Dewan komisaris atas nama Dwi Harry Prasetyo memiliki saham di BPR Puriseger Sentosa sebesar Rp. 220.000.000,- dengan komposisi kepemilikan 11%, untuk Komisaris atas nama Drs. moh. jakin tidak memiliki saham di BPR Puriseger Sentosa			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Dwi Harry Prasetyo,SE,MM	601758	PT. BPR Buduran Delta Purnama	10%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Dewan Komisaris atas nama Dwi Harry Prasetyo,SE,MM mempunyai saham di PT BPR Buduran Delta Purnama Sidoarjo dengan kepemilikan saham sebesar 10%				

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Dwi Harry Prasetyo,SE,MM	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Drs Mochammad Jakin	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh anggota Dewan komisaris PT BPR Puriseger Sentosa tidak mempunyai hubungan keuangan dengan anggota dengan komisaris yang lain, dengan direksi maupun dengan pemegang saham				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Dwi Harry Prasetyo,SE,MM	Tidak ada	Tidak ada	H. Seger Gatot Susanto,SH - Keponakan
2.	Drs Mochammad Jakin	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Dewan Komisaris tidak ada hubungan keluarga dengan komisaris yang lain juga dengan anggota Direksi. Ada hubungan keluarga (keponakan) antara Dwi Harry Prasetyo,SE,MM selaku Komisaris Utama dengan pemegang saham atas nama H. Seger Gatot Susanto,SH				

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp.392.000.000,00	2	Rp. 257.000.000,00
2.	Tunjangan	2	Rp. 33.000.000,00	2	Rp. 21.750.000,00
3.	Tantiem	2	Rp. 90.667.013,00	2	Rp. 60.444.675,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp. 0,00	0	Rp 0,00
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp. 0,00	0	Rp. 0,00
Total			Rp. 515.667.013,00		Rp. 339.194.675,00

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Mobil Dinas Direksi berjumlah 2 (dua) unit , 1(satu) unit Toyota Inova untuk masing masing Direksi	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	Asuransi Kesehatan dari BPJS kesehatan maing masing Direksi	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	Jaminan Ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan, fasilitas akomodasi unruk kegiatan dan rapat untuk masing masing Direksi	Akomodasi Kegiatan/rapat

Penjelasan Lebih Lanjut :

Berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham masing - masing Direksi mendapatkan fasilitas kendaraan dinas berupa Toyota Inova, Asuransi Kesehatan dari BPJS Kesehatan, jaminan perlindungan ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan serta fasilitas akomodasi pada saat rapat maupun kegiatan. sedangkan dewan komisaris mendapatkan fasilitas akomodasi rapat dan kegiatan pada saat mewakili BPR PURISEGER SENTOSA

G. Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1.68 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.03 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.23 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.4 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2.28 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Perbandingan rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah 1,68 :1, rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah 1,03 : 1; rasio gaji dewan komisaris tertinggi dan terendah 1,23 : 1, rasio gaji Direksi tertinggi dan Dewan Komisaris tertinggi 1,4 : 1, sedangkan rasio gaji direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 2,28 : 1	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	15 Januari 2021	2	Rapat evaluasi kinerja triwulan IV tahun 2020
2	16 April 2021	2	Rapat evaluasi kinerja triwulan I tahun 2021
3	09 Juli 2021	2	Rapat evaluasi kinerja triwulan II tahun 2021
4	08 Oktober 2021	2	Rapat evaluasi kinerja triwulan III tahun 2021
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat 4 kali dalam 1 (satu) tahun dalam rangka rapat evaluasi kinerja setiap triwulan termasuk didalamnya menentukan rekomendasi kepada Direksi			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Dwi Harry Prasetyo,SE,MM	4	0	100%
2.	Drs Mochammad Jakin	4	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Rapat Dewan Komisaris seluruhnya dihadiri oleh Dewan Komissaris secara lengkap				

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Selama tahun 2021 tidak ada penyimpangan internal (Internal fraud)								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Nihil		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.	Edy Suyono	Direktur Utama	Dwi Harry Prasetyo, SE, MM	Komisaris Utama	Kredit Pegawai	Rp78,00	Sesuai SOP
2.	Sucipto	Direktur	Dwi Harry Prasetyo, SE, MM	Komisaris Utama	Kredit Pegawai	Rp13,00	Sesuai SOP
3.	Sukardi	Kabag. Kredit	Sucipto	Direktur	Kredit Pegawai	Rp57,00	Sesuai SOP
4.	Indarwati	PE Audit Internal	Sucipto	Direktur	Kredit Pegawai	Rp49,00	Sesuai SOP
5.	Slamet Hariyadi	Ka. Knt Kas	Sucipto	Direktur	kredit pegawai	Rp63,00	Sesuai SOP
Penjelasan Lebih Lanjut :							
Terjadi benturan kepentingan namun tidak merugikan BPR karena dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan internal tentang kredit kesejahteraan pegawai							

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	21 Oktober 2021	Sosial	Kegiatan edukasi	Orang tua / wali murid	Rp5.055.500,00
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Kegiatan sosial dilakukan bersamaan dengan kegiatan edukasi bertempat di aula sekolah MI Tanwirul Afkar Medali kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto . Kegiatan tersebut diadakan dengan mengundang wali murid dan guru dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dalam pengelolaan keuangan serta pengenalan produk perbankan . Dalam kegiatan tersebut setiap peserta diberikan konsumsi dan cinderamata .					



BAB III

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR : BPR PURISEGER SENTOSA
Alamat : Jl Jayanegara 183 Mojokerto Nomor Telepon : 0321-392938
Posisi Laporan : Desember 2021
Modal Inti : Rp11.580.808.528,00
Total Aset : Rp55.092.155.495,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG BPR PURISEGER SENTOSA Desember 2021, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 1.6 dengan predikat Sangat Baik (1)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut :

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Penanganan Benturan Kepentingan	2.5	0.25
2	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
3	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.29	0.258
4	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.36	0.204
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.67	0.167
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1.63	0.163
7	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.96	0.196
8	Rencana Bisnis BPR	1.37	0.103
9	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1	0.025
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.85	0.139
11	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1.9	0.143
Nilai Komposit			1.6
Predikat Komposit			Sangat Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2021 sebaga berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.29)
Jumlah anggota Direksi 2 (dua) orang yaitu Direktur Utama yang juga merupakan anggota Direktur YMF Kepatuhan da Direktur
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.36)
Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri atas 1 (satu)Komisaris Utama dan 1 (satu) anggot Dewan Komisaris
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)
Tidak Menerapkan Komite
4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2.5)
BPR telah memiliki Kebijakan penanganan benturan kepentingan dan telah dilaksanakan dengan baik
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1.67)
BPR telah memiliki Direktur YMF Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang berfungsi untuk melakukan serangkaian tindakan atau langkah langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan,sistem, da prosedur, serta kegiatan yang dilakukan oleh BPR telah sesuai perundangan- undangan lainnya.
6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.63)
PE Audit Intern di BPR telah melaksanakan penerapan fungsi audit intern dan independen terhadap satuan kerja operasiona serta telah menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada internal dan kewajiban pelaporan ke pihak eksternal (OJK)
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1)
BPR telah menugaskan Audit Eksternal sesuai dengan ketentuan dan hasil Audit Eksternal dimaksud telah menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh BPR.
8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1.96)
BPR telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dan telah menilai hasil penerapan Manajemen Risik dalam bentuk Profil Risiko sebagai umpan balik untuk perbaikan kualitas pengendalian internal kontrol. Laporan Profil Risiko dimaksud juga telah disampaikan ke OJK 2 (dua) kali dalam setahun.
9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1.9)
BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai BMPK dan telah melaksanakannya secar disiplin,dalam menjalankan Operasional selalu berhati- hati agar tidak melanggar ketentuan BMPK.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1.37)
Rencana Bisnis Bank BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan disampaikan ke OJK sesuai ketentuan.
11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1.85)
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan telah didukung oleh sistem pelaporan keuangan dan non keuangan. juga telah menyusun Laporan Keuangan Publikasi setiap triwulan.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

1. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola PT BPR PURISEGER SENTOSA berdasarkan penilaian sebagian besar telah sesuai ketentuan dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Struktur Tata Kelola meliputi Direksi, Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan dan Audit Internal, Ketentuan BMPK, Penunjukan Audit Ekstern, Penyusunan Rencana Bisnis dan Transparansi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
 - b. Struktur di Faktor 1 dan 2 terkait dengan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing berjumlah 2 (dua) dan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Proses Penerapan Tata Kelola
Proses Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian sudah cukup efektif yang didukung oleh struktur yang cukup lengkap dan terus dilakukan upaya perbaikan terkait dengan penerapan Tata Kelola.
3. Hasil Penerapan Tata Kelola
Hasil Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian baik yang dihasilkan dari aspek proses Tata Kelola yang cukup efektif dengan didukung oleh struktur yang cukup lengkap.

Mojokerto, 14 April 2022

BPR PURISEGER SENTOSA


Edy Suyono
Direktur Utama




Dwi Harry Prasetyo, SE, MM
Komisaris Utama